

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adrianus, Y. (2009). *Kualitas Pendampingan PT. Newmont Nusa Tenggara Melalui Program Pengembangan Masyarakat Berbasis Konservasi Di Kecamatan Maluku Kabupaten Sumbawa Barat*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Akai & Sakata. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-level Cross-section Data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52(1), 93-108.
- Ale. (2017). *Pendamping Desa Belum Maksimal*. Cilacap: Satelitpost, diakses dari <https://satelitpost.com/regional/cilacap/pendamping-des-a-belum-maksimal>.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100-Potensi-Kelemahan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa>, pada 2 Oktober 2018.
- Blakely, T. K. (2002). *Economic Development Theory and Practice. 12th Edition*. Sage Publication.
- Booth, A. (2003). Decentralisation and Poverty Alleviation in Indonesia. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 21(2), 181-202.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Cummings, Seferiadis, Maas, Bunders, & Zweekhorst. (2018). Knowledge, Social Capital, and Grassroots Development: Insight from Rural Bangladesh. *The Journal of development Studies*, 1-16.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemententerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (2016). Standar Operasional dan Prosedur Pembangunan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Hamidi, Setijonegoro, Fujitriartanto, Sa'id, Harioso, Huda, ... Mu'arofah. (2015). *Indeks Desa Membangun 2015*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Handayani, S. (1981). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat. (1986). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Mas Agung.
- Hill, H. (2008). Globalization, Inequality, and Local-level Dynamics: Indonesia and the Philippines. *Asian Economic Policy Review*, 3(1), 42-61.
- Januarianti, P. A. (2018). *Evaluasi Program Rp 50 Juta Per Rukun Tetangga (Studi Kasus di Kelurahan Satimpo Bontang Selatan Kota Bontang*. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara (Manajemen dan Kebijakan Publik). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kemendes Pecat Lebih dari 1.000 Pendamping Desa tidak Baik. (18 Agustus 2018). [Republika.co.id, https://republika.co.id/berita/ekonomi/desa-bangkit/18/08/18/pdn8p5423-kemendes-pecat-lebih-dari-1000-pendamping-desa-tidak-baik](https://republika.co.id/berita/ekonomi/desa-bangkit/18/08/18/pdn8p5423-kemendes-pecat-lebih-dari-1000-pendamping-desa-tidak-baik), pada 2 Oktober 2018.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa*. Jakarta: Diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn160-2015.pdf>.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Menko PMK: Seribu Desa untuk tahap Awal Program Padat Karya*. . Siaran Pers Nomor 19/HumasPMK/II/2018.
- Khandker, Koolwal, & Samad. (2010). *Handbook on Impact Evaluation*. World Bank (Vol. 41).

- Kisman & Tasar. (2014). The Key Elements. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 1689-1696.
- KPK. (2015). *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Luthfiani, N. A. (2014). *Evaluasi Peran Pendamping Terhadap Keberhasilan Program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul*. Skripsi. Program Studi S1 Penyuluhan & Komunikasi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lwihpakerti dan Purnaweni. (t.thn.). *Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Mendagri: Pengawasan Dana Desa Perlu Ditangani Serius. (2017). Tempo.co, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1026649/mendagri-pengawasan-dana-desa-perlu-ditangani-serius>, pada 2 Oktober 2018.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2017). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*. Jakarta: Diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1359-2017.pdf>.
- Movanita, A. (2018). *Dana Desa Paling Banyak Dikorupsi*. Kompas.com, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/14223331/dana-desa-paling-banyak-dikorupsi-polisi-minta-masyarakat-aktif-awasi>, pada 2 Oktober 2018.
- Muzaki, K. (2018). *Kecolongan Program Tak Tepat Sasaran, Bupati Purbalingga Terjunks Petugas ke Desa Miskin*. TribunJateng.com, diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/2018/03/03/kecolongan-program-tak-tepat-sasaran-bupati-purbalingga-terjunks-petugas-ke-desa-miskin?page=2>, pada 17 Oktober 2018.
- Oates, W. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Patilima, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. Jakarta: Diakses dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana-desaya-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60_2014.pdf.
- Pemerintah RI. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014*. Jakarta: Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/8TAHUN2016PP.pdf>.
- Prawirosentono, S. (2008). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Prima, S. R. (2017). *Analisis Ketimpangan Pengalokasian Dana Desa Antarwilayah di Indonesia Tahun 2015*. Yogyakarta: Tesis, Program Magister Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.
- Ravianto. (1989). *Produktivitas dan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Restianingsih. (2018). *Evaluasi Dana Desa di desa Mandiri dan Desa Berkembang Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Desa Kemadang dan Desa Giripanggang 2015-2017)*. Tesis. Program Studi S2 Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ritchie, Lewis, Nicholls, and Ormston. (2014). *Qualitative Research Practice: A Guide For Social Science Students and Researchers*. London: SAGE Publications.
- Rustanto, B. (2009). *Pendamping Sosial*. <<http://pendamping-sosial.html>>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2013.
- Safi'I, H. (2009). *Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif teori dan Praktek*. Kandangan: Averroes Press.
- Sekretariat Kabinet RI. (2017). *Ditutup 31 Agustus 2017, Kementerian Desa dan PDTT Buka Lowongan 13.053 Tenaga Pendamping Desa*. Diakses dari <http://setkab.go.id/ditutup-31-agustus-2017-kementerian-desadan-pdtt-buka-lowongan-13-053-tenaga-pendamping-desad/>, pada 26 Oktober 2018.
- Senoaji, W. W. (2004). *Efektivitas Program Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Pada Badan Diklat Propinsi DIY*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soewadji. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Sorensen. (2012). Testing the Hypothesis of Higher Social Capital in Rural Areas: The Case of Denmark. *Regional Studies*, 46(7), 873-891.
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suparjan dan Hempri. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Jakarta: Aditya Media.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. (t.thn.).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintdahan Daerah. (t.thn.).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (t.thn.).
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods (5th ed.)*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Zhang, G. (2013). The Impacts of Intergovernemntal Transfers on Local Government' Fiscal Behavior in China: A Cross-Country Analysis. *Australian Journal of Public Administration*, 72(3), 264-277.